



Kunjungan Delegasi KNDU (Korsel) ke Lemhannas RI

Selasa (2/8), Lemhannas RI menerima rombongan dari Korea National Defense University (KNDU). Rombongan ini diterima oleh Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP. selaku Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI dalam *courtesy call* di Ruang Nusantara II, Gd. Trigatra, Lemhannas RI... (selengkapnya ke hal. 10...)

Pancasila Harus Diaplikasikan



Foto: Humas Lemhannas RI

“Pancasila jangan sampai menjadi hafalan saja, tapi harus juga diaplikasikan” ucap Deputy Bidang Pementapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI M. Nasir Majid dalam *talkshow* dengan TVRI Palangkaraya pada Kamis (21/8). Nasir Majid menambahkan bahwa pengamalan nilai Pancasila mencakup nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Persatuan dan Kesatuan haruslah seimbang, dan di tengah pesimisme yang menerpa nilai kebangsaan, Lemhannas RI memiliki kewajiban dalam penyebarluasan optimisme perkembangan Indonesia di masa depan.

Selain Nasir Majid, dalam dialog yang berlangsung selama satu jam tersebut, hadir pula sebagai narasumber, Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Efrensia. L. P. Umbing., Msi., dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah H.M. Yamin Mukhtar, Lc.

Keterarikan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap acara ini sangat tinggi. Hal ini nampak dalam dialog interaktif dimana antusiasme masyarakat yang begitu besar untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep wawasan kebangsaan, yang berarti masih banyak warga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Antusias masyarakat tersebut dapat dilayani oleh narasumber melalui tanggapan atas pernyataan maupun jawaban atas pertanyaan masyarakat secara jelas, singkat, dan tepat sasaran.

Acara *talkshow* Harmoni Kebangsaan yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Kalimantan Tengah ini, membahas tentang pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dari beragam sudut pandang. Ir. Efrensia. L. P. Umbing., Msi. melihat bahwa masalah wawasan kebangsaan yang mengemuka masih dalam tataran perbedaan bahasa, dimana masyarakat masih belum sepenuhnya memahami materi wawasan kebangsaan dari pemerintah.

“Masalah lainnya adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu, pemuka agama sangat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang gotong-royong dan memelihara budaya lokal masyarakat Kalimantan Tengah,” imbuh Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini.

DAFTAR ISI

-  **2** Pancasila Harus Diaplikasikan
-  **3** Mencermati Pendidikan Anak demi Pembangunan Nasional
-  **4** Pembukaan *Outbond* Anggota DPR RI Gelombang Kedua
-  **5** Wawasan Kebangsaan Perlu Disosialisasikan
-  **5** Dialog Kebangsaan Bagi Generasi Muda
-  **6** Anggota DPR RI Tidak Waspada, NKRI Bisa Rontok
-  **6** Mencari Bentuk Terbaik Sistem Pemerintahan Indonesia
-  **7** Gerakan Pramuka, Motor dan Pendorong Penguatan Jati Diri Bangsa
-  **8** Memperkuat Industri Pertahanan
-  **9** Pelatihan Korespondensi Bahasa Inggris
-  **9** Anggota DPR RI Berkomitmen Untuk Selalu Amanah, Disiplin, Jujur dan Bertanggung Jawab
-  **10** Kunjungan Delegasi KNDU (Korsel) ke Lemhannas RI
-  **11** Kunjungan Tim Transisi Jokowi-JK ke Lemhannas RI
-  **12** Pembekalan Anggota DPR RI oleh 3 Kepala Staf TNI

REDAKSI

Pengarah :
Komjen Pol Boy Salamuddin
Penanggung Jawab :
Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.
Redaktur :
Ir. Yusita Pusparini, M.Sc
Penyunting/Editor :
Kolonel Laut (P) Maghoni.
Redaktur Pelaksana :
Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos., Aditya Solehah S.Hum, Aska Leonardi, M. I. Kom, Triana Rahmawaty, S.Hum.
Desain
Bambang Iman Aryanto, S.T.
Fotografer :
Suryadi, Dwi Jayanto
Sekretariat :
Linda Purnamasari S.Sos., Letkol Caj G.T. Situmorang, Gatot, Indiah Winarni.
Distribusi :
Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono.
Alamat Redaksi :
Biro Humas Setama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,
Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,
Website <http://www.lemhannas.go.id>

Mencermati Pendidikan Anak demi Pembangunan Nasional



Foto : <http://keluarga404.files.wordpress.com/2012/02/sekolah1.jpg>

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI kembali menyelenggarakan Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional pada Kamis (21/8) di Gd. Dwi Warna Purwa. Kali ini, dialog mengangkat tema **“Tantangan bagi Pembangunan Nasional dalam Bidang Sosial Budaya.”**

Dalam dialog tersebut, dibahas tentang salah satu sasaran utama pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan sumber daya manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Untuk mewujudkannya, pola pembangunan nasional haruslah berwawasan kependudukan, yakni penduduk bukan hanya menjadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan itu sendiri.

Menurut Kabalitbang Kemendikbud, Bambang Indiarito, keberagaman referensi itulah yang berpengaruh besar pada anak dan akan mempengaruhi pola pikir dalam pendidikan anak. “Apalagi kini kita sebagai orang tua sangat sulit mengontrol isi/konten dari rujukan-rujukan virtual tersebut,” ujarnya.

Senada dengan Bambang Indiarito, Titik Haryati menekankan pentingnya pembentukan karakter anak bukan hanya ‘sejak dini’ melainkan harus dilakukan sejak dalam kandungan. Lebih lanjut, Komisioner KPAI ini menjelaskan, “Pendidikan dalam lingkungan

masyarakat juga sangat penting dalam membentuk karakter anak, seperti pemberian contoh disiplin, nilai-nilai kehidupan, dan aspek spiritual anak.

Hal tersebut juga yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam menyiapkan suatu wawasan kebangsaan, terutama pada anak, sehingga anak mempunyai karakter yang kuat dan saat mereka menerima banyak informasi dari rujukan lain, mereka dapat memilih sendiri hal yang baik dan buruk.”

Beberapa narasumber yang hadir antara lain Dr. Ir. Bambang Indiarito selaku Kabalitbang Kemendikbud, Dr. Titik Haryati yang mewakili Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Uhamka, Prof. Dr. Bondan Tiara Sofyan selaku Guru Besar Teknik UI, Dr. Amirsyah T mewakili MUI, Dwiyanto Prihartomo mewakili Aliansi Advokat Peduli Kabinet, Suwarsono selaku Penasehat KPK, dan Budi Prasetyo, S.H., M.M. dari Kemendagri.

Dialog Kebangsaan yang disiarkan langsung oleh TVRI ini, turut dihadiri oleh beberapa pejabat Lemhannas RI, antara lain Deputi Pendidikan Pemimpin Tingkat Nasional Laksda TNI Ir. Leonardi, Drs. Sukendra Martha selaku Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geografi, dan Marsda TNI Beng Tardjani selaku Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Diplomasi.

Pembukaan *Outbond* Anggota DPR RI Gelombang Kedua

Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi S.E., membuka kegiatan *outbond* yang bertema **"my wonderful moment with you,"** untuk para peserta gelombang kedua Program Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional Anggota DPR RI Periode tahun 2014-2019, pada Jumat pagi (22/8).

Upacara pembukaan yang bertempat di Ruang Pancasila Gd. Trigatra Lt. III Barat, Lemhannas RI ini diikuti sebanyak 68 orang peserta yang terbagi menjadi 4 kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 17 orang.

"*Outbond* ini bertujuan untuk membangun jiwa *entrepreneurship*, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, mengasah kepekaan terhadap lingkungan sekitar, memiliki kerendahan hati, serta semangat nasionalisme untuk membangun bangsa dan negara Indonesia," ungkap Dede Rusamsi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Lido, Sukabumi selama tiga hari ini, merupakan salah satu rangkaian kegiatan pendidikan yang dirancang oleh Lemhannas RI bekerja sama dengan Sekjen DPR RI untuk menyeimbangkan pendidikan yang berupa materi dan diskusi, dengan pelatihan jasmani.

Dalam kegiatan ini, peserta dihadapkan pada permainan dan persoalan yang harus diselesaikan secara perorangan maupun berkelompok.

Selain itu, diuji pula kemampuan fisik dan mentalnya, untuk selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan, keuletan, serta kesabaran dalam menghadapi tekanan dan masalah yang akan diberikan oleh tim *outbond* Lemhannas RI yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya.



Foto : Humas Lemhannas RI

Wawasan Kebangsaan Perlu Disosialisasikan



Foto : Humas Lemhannas RI

Pengetahuan wawasan kebangsaan perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, kata Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Strategi Lemhannas RI, Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, SE di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat (22/8).

Hal tersebut dikatakannya dalam acara Dialog Kebangsaan di Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah, M. Syairi.

Menurut Mayjen TNI (Purn) Imam Maksudi, hal tersebut bermanfaat untuk melindungi bangsa dari bahaya penetrasi budaya asing. "Pengetahuan mengenai masyarakat sangat penting untuk melindungi serangan budaya asing", ujarnya.

Dikatakan, pengetahuan tersebut juga bermanfaat untuk membendung pengaruh buruk invasi asing yang dapat merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti ISIS yang muncul ke permukaan belakangan ini.

Namun demikian, katanya lagi, ia menengarai ada kesenjangan pengetahuan wawasan kebangsaan saat ini, dimana pemuda masih banyak yang belum memahami besarnya potensi Kalimantan Tengah, baik budaya maupun kekayaan alam.

Masih menurut Imam Maksudi, guna harmonisasi kebangsaan komponen bangsa saat ini, membutuhkan kerukunan umat beragama, baik di kalangan pemuda maupun semua lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan tengah khususnya.

Sementara itu, sebagai mitra Lemhannas RI, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) H.M. Syairi Abdullah menyatakan senantiasa siap bekerja sama untuk mensosialisasikan wawasan kebangsaan di Kalimantan Tengah. "Kami siap mensosialisasikan wawasan kebangsaan kepada semua lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah ini" ujarnya dengan tegas.

Dialog Kebangsaan Bagi Generasi Muda



Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69, bertempat di Museum Wayang seputar Kota Tua Jakarta, pada hari Minggu (23/8), Lemhannas RI bekerja sama dengan Forum Peduli Budaya Nusantara (FPBN) dan Kwartir Nasional (organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional), menyelenggarakan Dialog Kebangsaan guna membangun generasi muda yang berkarakter.

Dialog kebangsaan ini menghadirkan narasumber Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI, Prof. Dr. Njaju Jenny M.T. Harjatno yang membawakan materi berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan generasi muda dalam mengantisipasi dampak globalisasi bagi jiwa nasionalisme.

Dalam ceramahnya dihadapan para pelajar SMA itu, ia menyampaikan bahwa segala informasi yang dapat diakses oleh generasi muda, jangan serta merta ditelan mentah-mentah sehingga membawa perubahan perilaku maupun gaya hidup bebas yang meninggalkan budaya bangsa.

Namun menurutnya, generasi muda juga harus bisa memilah sehingga budaya bangsa tetap mendapat ruang dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain jiwa dan semangat penghormatan, kesederajatan insan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, kebebasan yang bertanggung jawab, peri keadilan, non diskriminasi, solidaritas, toleransi hingga kehidupan bergotong royong.

Untuk tetap mempertahankan semangat para peserta dalam mengikuti kegiatan, disela-sela acara disisipkan atraksi sulap yang dibawakan oleh Edy Wijaya dengan melibatkan partisipasi para Pramuka. Atraksi ini, bukan semata-mata untuk menghibur, namun disampaikan pula tujuan dan pesan-pesan moral yang

terkandung di dalamnya.

Narasumber lain, Dr. Vita Soemarno Manurung, MM, menyampaikan paparan dengan tema **"Pembangunan Karakter Generasi Penerus"** melalui audio visual disamping metode ceramah. Hal-hal yang terjadi dalam dunia kehidupan sehari-hari para anggota Pramuka ini, diangkat dan dikupas dikaitkan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Bahkan untuk menggugah semangat nasionalisme, diputar pula lagu Garuda Pancasila dengan penjelasan makna setiap kalimat di dalamnya.

Menggali pendapat mengenai acara ini, Dennis pelajar dari SMAN 23 Jakarta Barat menyatakan, "Acaranya keren banget! Saya jadi lebih paham prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Sebagai pelajar, saya jadi makin termotivasi untuk terus belajar dan berkontribusi untuk membangun bangsa".

Para peserta rata-rata menyampaikan kesan bahwa acara tersebut sangat menarik dalam penyajian materi, baik animasi yang ditampilkan maupun cara narasumber dalam menyampaikan materi secara kreatif. Cara penyajian tersebut, sesuai dengan selera anak muda, terlebih dengan adanya *game*/permainan yang dilakukan serta kemampuan narasumber membangun motivasi.

Para peserta berharap agar kegiatan ini tidak hanya mereka nikmati, tetapi lebih sering dilakukan tidak terbatas pada perwakilan pelajar, namun kepada pelajar lain secara luas dengan frekuensi yang lebih sering.

Kegiatan ini diikuti oleh 130 pelajar/Pramuka dari SMA dan SMK dari 7 wilayah kota yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bogor dan Tangerang dengan didampingi oleh para Pembina Pramuka.

Anggota DPR RI Tidak Waspada, NKRI Bisa Rontok



Foto : Humas Lemhannas RI

Lemhannas RI bekerja sama dengan Sekjen DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Anggota DPR RI periode 2014-2019 di Gd. Dwi Warna Purwa, pada Senin (25/8). Kegiatan yang merupakan gelombang ketiga bagi anggota DPR RI yang baru terpilih ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI didampingi Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Dalam laporan pelaksanaan yang dibacakan oleh Deputy bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Laksda TNI Ir. Leonardi M.Sc, dijelaskan tujuan dari kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan sejak 25 Agustus 2014 sampai dengan 12 September 2014 ini adalah untuk memantapkan anggota DPR RI yang berkarakter dan negarawan, memiliki pengetahuan dan wawasan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Menurut Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji D.E.A., Anggota DPR RI ini nantinya akan dibekali penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang dapat merugikan negara. "Karena anggota DPR RI ini terdiri dari berbagai macam partai politik dan berbagai macam latar belakang. Kalau para anggota DPR RI tidak waspada maka bisa merontokkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita jaga bersama ini," ujar Gubernur Lemhannas RI.

Senada dengan pernyataan Budi Susilo Soepandji, Wakil Ketua DPR RI mengatakan sudah seharusnya anggota parlemen dibekali dengan wawasan kebangsaan. Menurutnya,

saat ini bangsa Indonesia sudah mulai kehilangan sisi-sisi peninggalan asli budaya bangsa, sehingga para wakil rakyat ini perlu mendapat pembekalan khusus agar pada saat membuat undang-undang mereka tetap konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa.

"Kekuasaan Parlemen berdasarkan undang-undang konstitusi yang baru ini adalah besar. Presiden pasti akan berunding untuk menentukan berbagai keputusan penting mengenai negara," jelas Priyo Budi Santoso.

Pada satu kesempatan, Sekjen DPR RI Dr. Winantuningtyastiti M.Si sangat mengapresiasi kegiatan yang baru pertama kalinya dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI ini.

"Semua positif, mereka (anggota DPR RI) mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan semacam ini. Namun, mereka agak menyesalkan waktu penyelenggaraan yang terlalu singkat," ungkap Winantuningtyastiti.

Jumlah anggota DPR RI wajah baru yang hadir pada kegiatan pembekalan kali ini sebanyak 147 orang, dengan rincian sebanyak 29 orang berasal dari Partai Golkar, Partai Hanura sebanyak 3 orang, PKB sebanyak 16 orang, PPP sebanyak 6 orang, Partai Nasdem sebanyak 25 orang, PAN sebanyak 7 orang, Partai Gerindra sebanyak 21 orang, Partai Demokrat sebanyak 11 orang, PDIP sebanyak 19 orang, dan PKS sebanyak 10 orang.

Mencari Bentuk Terbaik Sistem Pemerintahan Indonesia

Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional kembali diselenggarakan Lemhannas pada Selasa (26/8), dengan mengangkat tema **“Membangun Sistem Demokrasi di Indonesia”**. Acara yang disiarkan langsung di TVRI ini, dipandu oleh Maulana Isnarto dan dibuka oleh Deputy Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI M. Nasir Majid.

Dialog yang dilatarbelakangi perjalanan sejarah Indonesia yang telah mengalami beberapa sistem pemerintahan sejak masa berdirinya Negara pada tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaannya, negara ini menganut sistem integralistik dengan lembaga yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang tidak bertahan lama.

Pada tahun yang sama, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal multi partai sesuai Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 November 1945. Pada perkembangannya, Sistem Pemerintahan Presidentiil dan Parlementer juga sempat dialami oleh negeri ini. Namun, penerapan sistem-sistem ini, tentunya tidak lepas dari kekurangan di berbagai aspek yang perlu menjadi evaluasi untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Drs. Edijan Tanjung, M. Si. selaku Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menilai bahwa setelah Undang-Undang Dasar diamandemen pada masa 1999-2002, menjadikan lembaga tinggi negara saat ini mempunyai kedudukan yang sederajat. Di sisi lain, pengawasan terhadap lembaga tinggi Negara sangat



Foto : Humas Lemhannas RI

minim sehingga lembaga-lembaga tersebut sangat rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan. “Hal inilah yang mendasari diadakannya dialog ini dengan harapan muncul pemikiran-pemikiran yang solutif terhadap masalah ini,” ujarnya.

Tanggapan langsung muncul dari Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Pakar Hukum yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang. Menurutnya, perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia bukannya tanpa alasan yang jelas. Perubahan sistem tersebut justru terjadi karena mengikuti tuntutan zaman yang berbeda sehingga membutuhkan cara memerintah yang berbeda pula.

Turut hadir dan berpartisipasi dalam acara ini antara lain Pengamat Politik Hanta Yudha, Pengamat Politik CSIS J. Kristiadi, Hadimulyo (PPP), Bambang Harsono (Kabadiklat Hanura), Prof. Dr. Indria Samego, M.A. (LIPI), Ikhwan (PAN), Abdul Wahid Maktub (PKB), Prof. Dr. Djaali (rektor UNJ) dan Suwarsono (Dewan Penasihat KPK).

Gerakan Pramuka, Motor dan Pendorong Penguatan Jati Diri Bangsa

Pada Rabu (27/8) Gubernur Lemhannas RI Prof Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. memberikan Pembekalan Wawasan Kebangsaan yang mengangkat tema **“Membangun Pondasi Dasar Nasionalisme Menuju Negara Maritim Yang Lebih Maju dan Sejahtera”**. Kegiatan yang menjadi rangkaian Acara Pelayaran Lingkar Nusantara (Pelantara) IV Tahun 2014 diselenggarakan oleh Lantamal VII Kupang bertempat di hanggar helikopter (helipad) KRI Surabaya.

Kegiatan ini dihadiri oleh 690 orang yang terdiri dari 520 anggota pramuka dari seluruh Indonesia (antara lain dari Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Maluku) dan 170 awak dari Kapal Pemuda Nusantara (KPN). Acara ini turut dihadiri oleh Kapolda NTT Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana, Wakil Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Wadan Lantamal) VII Kupang Kolonel Laut (P) Khimayatul Islam, S.T., dan kru kapal KRI Surabaya beserta perwakilan dari organisasi masyarakat setempat.

Dalam paparannya, Budi Susilo Soepandji menyoroti dampak globalisasi yang mengancam kehidupan berbangsa dengan pengaruh negatifnya yang semakin merasuk ke jiwa pemuda-pemudi bangsa.



Foto : Humas Lemhannas RI

“Dihadapkan pada realita tersebut, eksistensi maupun peran kegiatan kepanduan dan gerakan pramuka merupakan alternatif pembangunan pondasi dasar nasionalisme yang bercirikan semangat kegotongroyongan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Gerakan Nasional Pramuka harus mampu menjadi motor dan pendorong dalam penguatan jati diri bangsa Indonesia dikalangan masyarakat,” ujar Gubernur Lemhannas RI seraya menutup paparannya.

Memperkuat Industri Pertahanan



Foto : Humas Lemhannas RI

Berempat di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gd. Pancagatra Lt. 3 Barat, Lemhannas RI mengadakan Dialog Kebangsaan dengan tema **“Pemantapan Wawasan kebangsaan melalui Peningkatan Industri Pertahanan guna Memperkokoh Ketahanan Nasional”**.

Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdyia TNI Dede Rusamsi, S.E. ini berlangsung pada Kamis (28/8) dan disiarkan secara langsung oleh TVRI selama 90 menit dengan moderator Desi Fitriani.

Dialog ini menghadirkan narasumber-narasumber, antara lain Laksda TNI Rahmat Lubis (Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI), Conny Rahakundini (pengamat militer), Prof. Dr. Wan Usman (Dosen UI), Sudirman Said (Direktur Utama PT. Pindad), Anto Sudaryanto (General Manager PT. Intiland), Gunanto (Bappenas) dan Petrus Hardana (Sarpras Polri).

Industri pertahanan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan sehingga harus didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan yang mendukung pertahanan melalui revitalisasi industri pertahanan. Revitalisasi industri pertahanan dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem industri pertahanan guna mewujudkan tujuan pertahanan nasional.

Dalam dialog ini, Laksda TNI Rahmat Lubis menjabarkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pertahanan, yaitu **pertama**, pelaksanaan Jakarta **International Defense Dialog** dengan negara-negara tetangga, **kedua** penyelenggaraan **Indo Defence** yang merupakan pameran alat-alat pertahanan bagi masyarakat umum, dan **ketiga** pembentukan **Defence Industry Joint Cooperation** yang merupakan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam memajukan industri pertahanan.

Hal yang penting dalam membangun industri pertahanan di negara ini, menurut Conny Rahakundini, ialah mendefinisikan dan memetakan tujuan dan ancaman yang nyata yang sedang kita hadapi sekarang, sehingga Indonesia dapat mengetahui dengan pasti bagian-bagian apa saja yang harus diperkuat dan dikembangkan. Dengan tujuan yang pasti, rencana, langkah-langkah, serta strategi akan lebih jelas terpetakan.

“Karena, dimana pun industri pertahanan akan tumbuh bila ada *demand*-nya. Dengan memperhatikan perubahan ancaman tentu kita akan mengetahui tujuan dari kekuatan TNI. Bila tujuan sudah jelas, baru kita dapat menentukan langkah ke depan mengenai industri pertahanan. Misalnya, apakah kita butuh membuat pabrik alat-alat pertahanan kita sendiri atau cukup dengan membeli dari negara lain saja?” ujar Pengamat Militer UI tersebut.

Pelatihan Korespondensi Bahasa Inggris

Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan potensi anggota, Lemhannas RI mengadakan Pelatihan Korespondensi Bahasa Inggris selama 5 (lima) hari, dimulai dari Senin (1/9) hingga Jumat (5/9).

Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama dengan LP3I Jakarta dengan bobot materi yang disampaikan berupa persuratan dan hal-hal administratif untuk berkoordinasi dan berkorespondensi dalam bahasa Inggris. Pelatihan yang dipandu oleh Redjeki Agoestyowai, M. Sos ini diadakan di Ruang *Telematika Operating Centre* (TOC) Gd. Asta Gatra Lt. 6 Lemhannas RI dan berdurasi tiga jam setiap harinya.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan anggota Lemhannas RI yang dipilih dari berbagai unit kerja. Pelatihan yang ditujukan bagi para anggota yang mempunyai fungsi strategis dalam bidang administratif ini diharapkan mampu meningkatkan



Foto: Humas Lemhannas RI

kualitas persuratan dan korespondensi dengan pihak Internasional menggunakan bahasa Inggris.

Anggota DPR RI Berkomitmen Untuk Selalu Amanah, Disiplin, Jujur dan Bertanggung Jawab

Pada Jumat (5/9), kegiatan "**Pembekalan dan Pemanapan Pemimpin Tingkat Nasional Anggota DPR RI Periode Tahun 2014-2019**" Gelombang II, telah selesai dan ditutup dengan sebuah upacara yang dilaksanakan di Gd. Dwi Warna Purwa.

Acara ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi SE., didampingi oleh Ketua DPR RI H. Marzuki Alie SE. MM., dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Winantuningtyastiti, M.Si., serta para tenaga ahli pengajar, pengkaji dan tenaga profesional Lemhannas RI.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Deputi bidang Pendidikan Pemimpin Tingkat Nasional Laksamana Muda TNI Ir. Leonardi M.Sc. selaku ketua penyelenggara, dijelaskan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung selama 3 minggu sejak 18



Foto : Humas Lemhannas RI

Agustus hingga 5 September 2014 dengan metode pendidikan berupa ceramah, diskusi, pembinaan peserta, dialog, serta *outbond*. Selama kegiatan berlangsung, dari 87 orang anggota DPR RI yang terdaftar sebagai peserta, hanya 68 orang yang tercatat mengikuti kegiatan.

Sementara itu yang mengikuti kegiatan dengan kehadiran di atas 75%, tercatat sebanyak 66 orang dan hanya satu orang yang mengikuti kegiatan dengan kehadiran di bawah 75% karena dinas ke luar negeri.

Dalam upacara penutupan tersebut, para peserta, membacakan komitmen bersama yang telah dirancang untuk dilaksanakan selama penugasannya pada 5 (lima) tahun mendatang. Komitmen tersebut antara lain setia terhadap empat konsensus dasar bangsa, serta amanah, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.

Dede Rusamsi yang mewakili Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya mengatakan bahwa tekad, semangat, dan komitmen terhadap wawasan kebangsaan merupakan modal utama dalam menyelesaikan berbagai perbedaan dan permasalahan dalam konteks bernegara.

Dede turut mengungkapkan kebanggaannya terhadap para peserta Pembekalan dan Pemanapan Wawasan Kebangsaan Pemimpin Tingkat Nasional ini, terutama komitmen bersama yang telah dibuat. Dede pun berharap, bahwa kepentingan sektoral partai hendaknya senantiasa disikapi secara cerdas dan bijak dalam konteks kepentingan bangsa dan negara yang utuh.

Kunjungan Delegasi KNDU (Korsel) ke Lemhannas RI

Pada Selasa (2/8), Lemhannas RI menerima rombongan dari Korea National Defense University (KNDU). Rombongan ini diterima oleh Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP. yang mewakili Gubernur Lemhannas RI dalam *courtesy call* di Ruang Nusantara II, Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Dharma didampingi oleh Ir. Kurdinanto Sarah selaku Tenaga Pengkaji Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI, Kepala Biro Kerjasama Sudibyo, S.E, dan Dr. Indira Santi Kertabudi selaku Kabag Kerma Internasional.

Rombongan dari Negeri Ginseng ini melakukan kunjungan dalam rangka studi banding antar kedua lembaga yang sama-sama berkecimpung dalam bidang pendidikan pertahanan dan keamanan. Dalam kunjungan tersebut dilakukan diskusi antara rombongan KNDU yang dipimpin oleh Prof. Park Moon Young dengan Lemhannas RI yang dipimpin Surya Dharma.

Diskusi tersebut melibatkan 29 orang dari KNDU yang terdiri dari pengajar, pelajar, penerjemah, dan jurnalis dan dari Lemhannas RI terdiri dari tenaga profesional, tenaga pengkaji, dan sebagian peserta PPRA 52 ini, berlangsung selama 90 menit.

Selain bertukar pikiran mengenai bentuk dan kegiatan masing-

masing lembaga, kedua belah pihak juga membahas isu-isu terkini seputar kedua negara. Para peserta pendidikan, baik dari Lemhannas RI maupun pihak KNDU sangat antusias berpartisipasi dalam berdiskusi.

Pada kesempatan ini pula peserta PPRA banyak mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi politik Korea Selatan, khususnya hubungan bilateral antara negara tersebut dengan negara-negara besar di sekitarnya.

Pertanyaan yang kritis tersebut dapat dijawab secara gamblang oleh para peserta pendidikan KNDU. Sementara peserta pendidikan KNDU juga ingin mengetahui mengenai isu-isu strategis yang sedang berlangsung di Indonesia dan juga sedang dikaji secara mendalam di Lemhannas RI.

Di akhir acara, Brigjen TNI Sudibyo selaku Karo Kerma Lemhannas RI menyampaikan beberapa harapannya mengenai kerjasama yang semakin erat di masa depan, misalnya dengan mengiriskan delegasi dari masing-masing negara untuk belajar di Lemhannas RI ataupun di KNDU.

Park Moon Young merespon, "Saya senang sekali dengan ide kerjasama tersebut. Sesampainya di Korea Selatan, saya akan langsung menyampaikan usul ini ke pihak-pihak terkait dan saya yakin responnya akan sangat positif."



Foto : Humas Lemhannas RI

Kunjungan Tim Transisi Jokowi-JK ke Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji menyampaikan bahwa Lemhannas RI mendapat kehormatan yang luar biasa atas kunjungan tim transisi Jokowi-JK ke Lemhannas RI, Selasa (9/9) di depan para wartawan pasca pertemuan. “Kami sudah berkoordinasi dengan tim yang ada di Kemenko Polhukam, dan pak Andi juga sudah berkoordinasi ke sana,” jelas Susilo Soepandji.

Kedatangan tim transisi yang diwakili oleh Deputi tim transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, dan Rizal Sukma tersebut adalah untuk mengetahui peran dan fungsi Lemhannas RI sebagai lembaga strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya sudah menjelaskan kepada beliau tentang peran dan fungsi Lemhannas RI,” tambah Budi Susilo Soepandji.

Senada dengan Budi Susilo Soepandji, Andi Widjajanto juga menjelaskan maksud kedatangannya ke Lemhannas RI adalah untuk mengidentifikasi Lemhannas RI sebagai institusi yang mempunyai peran strategis dalam mencetak kader pimpinan nasional. “Mungkin Lemhannas satu-satunya institusi di negara ini yang mempunyai peran strategis. Ini sangat penting bagi Jokowi-JK yang mempunyai gagasan untuk mewujudkan cita-cita revolusi mental,” imbuh Andi.

Andi juga mengungkapkan nilai strategis hasil pengukuran ketahanan nasional oleh Tim Labkurtannas. “Ini akan memudahkan pemerintah untuk melakukan penilaian dan memberikan treatment terhadap wilayah tertentu” katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih kurang satu setengah jam tersebut, Andi Widjajanto juga berjanji akan berupaya meyakinkan Jokowi-JK untuk lebih memperkuat peran dan fungsi Lemhannas RI di pemerintahan mendatang. Menurutnya,

hal ini diperlukan mengingat adanya harapan tim transisi atas peran pengkajian yang operasional terutama berkenaan dengan gagasan Jokowi-JK mewujudkan terminologi poros maritim dunia.

“Karena Lemhannas RI juga punya peran pengkajian dan dalam pemerintahan baru memerlukan kajian-kajian operasional mengenai gagasan kemaritiman yang diwujudkan dalam terminologi poros maritim dunia,” ucap Andi.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa meningkatnya kapasitas sistem Lemhannas, belum didukung dengan sarana yang memadai, dan ia berharap adanya perhatian dari pemerintah mendatang untuk mendukung pembangunan menara Lemhannas RI, serta pengembangan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. “Perlu ada perhatian dari Presiden nanti bahwa kebutuhan Lemhannas RI juga harus mendapat dukungan. Kita perlu membangun laboratorium, dan menara Lemhannas RI,” jelas Budi Susilo Soepandji.

Menurut Andi, harapan Gubernur Lemhannas RI ini juga akan disampaikan kepada Jokowi-JK. “Kami akan melihat detailnya dulu untuk diteruskan ke Jokowi-JK. Tetapi pada intinya komitmen untuk memperkuat Lemhannas RI supaya peran dan fungsi strategisnya tetap dilanjutkan ke depan,” kata Andi.

Mengenai adanya masukan terhadap kurikulum pendidikan di Lemhannas RI, Budi Susilo Soepandji menjelaskan dalam pertemuan tersebut Andi Widjajanto memberikan masukan yang konstruktif kepada Lemhannas RI. “Pak Andi memberikan masukan mengenai perbaikan kurikulum Lemhannas RI berkenaan dengan program revolusi mental,” imbuh Susilo Soepandji.

Pembekalan Anggota DPR RI oleh 3 Kepala Staf TNI



Pada hari Selasa (9/9), para peserta Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional DPR RI Gelombang Tiga menerima pembekalan mengenai kondisi Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pertahanan Indonesia dari Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Acara yang bertempat di Gd. Dwi Warna Purwa ini dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol.

Pada kesempatan ini, Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasal Laksamana TNI Marsetio, dan Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menjelaskan ancaman, tantangan, dan kebutuhan tentara Indonesia saat ini. Penjelasan ini termasuk penjelasan tentang perkembangan lingkungan strategis, geopolitik, dan konflik yang berkembang secara nasional dan internasional.

Menurut Gatot Nurmantyo, 70% konflik dunia yang berkembang sekarang ini, dilatarbelakangi oleh perebutan sumber energi, dan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber energi, termasuk minyak, gas, dan panas bumi, harus mengantisipasi munculnya konflik-konflik atas perebutan komoditas ini.

Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan TNI yang tangguh dan handal serta harus didukung dengan alutsista yang canggih yang sesuai dengan standar internasional.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasal Marsetio dan Kasau I.B. Putu Dunia yang sepakat bahwa kekuatan TNI saat ini masih belum mencapai *Minimum Essential Force* (MEF). Padahal (MEF) yang telah ditargetkan hanya merupakan kekuatan minimum untuk menghadapi ancaman serangan fisik dari satu negara saja, tidak lebih.

“Tentu tidak bisa dibayangkan bila nanti Indonesia menjadi target dari dua negara atau lebih, mengingat posisi geografis kita yang strategis dan konflik-konflik wilayah regional yang kini berkembang,” ujar Marsetio, merujuk konflik Laut Tiongkok Selatan yang kian memanas.

Paparan yang berlanjut dalam diskusi panel ini merupakan salah satu program Lemhannas RI dalam membekali para anggota DPR RI yang baru terpilih. Selain dibekali oleh tenaga profesional, tenaga ahli pengajar dan tenaga ahli pengkaji, peserta program ini juga mendapat paparan narasumber yang berasal dari unsur akademisi, birokrasi, dan praktisi.